

Collaborative Governance Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku Di Kabupaten Bulukumba

*Collaborative Governance in Slum Management Through the Kotaku Program in
Bulukumba Regency*

Nurazizah Amiruddin*, Udin B. Sore, Nining Haslinda Zainal

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

*email: nurazizahamiruddin05@gmail.com

Diterima: 21 Februari 2025 / Disetujui: 30 Juli 2025

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba. Meskipun program penanganan kumuh telah banyak dilakukan, proses relasional antar pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan masyarakat (BKM), dan pihak swasta, yang didukung oleh observasi dan dokumentasi. Analisis data dipandu oleh kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, proses kolaborasi terhambat oleh tantangan signifikan. Isu-isu utama meliputi partisipasi pemangku kepentingan yang tidak konsisten dalam dialog tatap muka yang menyebabkan kegagalan koordinasi; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat, terutama terkait transparansi finansial dan eksekusi proyek; serta konflik pembebasan lahan yang belum terselesaikan yang menggerus komitmen bersama. Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas program Kotaku sangat bergantung pada penguatan proses inti kolaborasi, bukan hanya pada hasil fisik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur administrasi publik dengan menyajikan bukti empiris mengenai titik-titik gesekan spesifik dalam kolaborasi multi-stakeholder untuk pembangunan perkotaan dalam konteks daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Penanganan Kumuh, Kotaku

Abstract

This study analyzes the dynamics of collaborative governance in the Kotaku (City Without Slums) program in Kalumeme Village, Bulukumba Regency. While slum upgrading programs are common, the relational processes between stakeholders often determine their success or failure. This research adopts a descriptive qualitative approach, utilizing in-depth interviews with key stakeholders from local government agencies (OPD), community representatives (BKM), and the private sector, supplemented by observation and documentation. The data were analyzed using the collaborative governance framework by Ansell and Gash. Findings reveal that despite some progress, the collaboration process was hampered by significant challenges. Key issues included inconsistent stakeholder participation in face-to-face dialogues, leading to coordination failures; difficulties in building robust trust, particularly regarding financial transparency and project execution; and unresolved land acquisition conflicts that undermined shared commitment. The study concludes that the effectiveness of the Kotaku program is critically dependent on strengthening the core collaborative processes, not just on physical outputs. This research contributes to public administration literature by providing empirical evidence on the specific friction points within a multi-stakeholder collaboration for urban development in a regional Indonesian context.

Keywords: Collaborative Governance, Public Policy, Slum Upgrading, Kotaku



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan daerah perkotaan yang sangat pesat berujung pada meningkatnya tempat tinggal yang tidak layak mulai dari sarana, prasarana hingga utilitasnya, keterbatasan pemerintah dalam mengantisipasi kondisi seperti ini pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh perkotaan. Fenomena ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subjek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini juga diperuntukkan sebagai peluang kemitraan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat sekitar 22% penduduk perkotaan di Indonesia yang bermukim di wilayah permukiman kumuh dimana akses terhadap pelayanan dasar minimumnya masih rendah. Pada tahun 2014, telah diidentifikasi bahwa permukiman kumuh di Indonesia mencapai sekitar 38.000 Ha yang tersebar lebih dari 3.500 kelurahan yang ada di Indonesia. Kriteria kumuh tersebut ditandai dengan perumahan- perumahan yang masih dibawah standar, masih belum terpenuhinya akses infrastruktur dasar (air, sanitasi, jalan, dll), kesehatan lingkungan yang buruk serta kawasan rumah yang kondisinya berdesak-desakan dan rentan akan bencana alam Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan apa yang sudah ditegaskan didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 yang mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program Kotaku, dikarenakan banyaknya kawasan permukiman kumuh yang harus diberikan perhatian. Terdapat 13 kawasan kumuh tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang termasuk kedalam kawasan permukiman kumuh, namun tidak semua kelurahan tersebut kumuh, hanya beberapa kawasan seperti satu ataupun dua RW, kawasan kumuh ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu, kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat. Pembagian kategori permukiman kumuh tersebut telah dibagi berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Dari tiga kategori tersebut, yang menjadi dominasi dari 10 kecamatan tersebut adalah kumuh sedang dimana aspek sarana dan prasarana ada yang cukup baik dan masih ada yang kurang baik.

Program Kotaku secara inheren mengadopsi pendekatan collaborative governance karena kompleksitas masalah permukiman kumuh tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Pendekatan ini diharapkan dapat memobilisasi sumber daya dan menciptakan sinergi antar aktor. Sebagai salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh), Pemerintah Kabupaten Bulukumba tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani program ini melainkan juga pihak swasta dan tentunya masyarakat. OPD yang menangani pun tidak hanya terbatas disatu OPD melainkan dibeberapa OPD lainnya. Begitu pun ditingkat pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak hanya menangani permasalahan ini sendiri melainkan juga dibantu oleh beberapa Kementerian terkait. Sangat tidak memungkinkan jika program ini ditangani oleh beberapa pihak saja, penanganan ini membutuhkan banyak aktor yang tentunya dapat diajak berkolaborasi dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh. Studi sebelumnya mengenai Program Kotaku (misalnya, Fitriana et al., 2018; Rosyida, 2017) cenderung berfokus pada evaluasi hasil infrastruktur atau deskripsi proses secara umum. Namun, analisis yang mendalam mengenai dinamika, tantangan, dan titik-titik

kritis dalam proses kolaborasi itu sendiri—khususnya mengenai faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya seperti kegagalan koordinasi dan konflik antar aktor di tingkat local masih terbatas. Terdapat kesenjangan pemahaman mengenai mengapa dan bagaimana mekanisme kolaborasi dalam program Kotaku terkadang berjalan tidak efektif di lapangan.

Collaborative governance tidak muncul secara tiba-tiba. Adanya kompleksitas masalah yang mengharuskan adanya kolaborasi yang di kemukakan oleh Ansell and Gashh menjelaskan bahwa *collaborative governance* dilatar belakangi oleh perkembangan organisasi dan berkembangnya pengetahuan serta kapasitas institusi atau organisasi, seiring dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari lingkungan selama oragnisasi tersebut bekerja.

Penelitian bertujuan menganalisis dinamika collaborative governance dalam program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai proses, dinamika, dan persepsi para aktor yang terlibat dalam kolaborasi Program Kotaku. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Kalumeme, Kabupaten Bulukumba, yang menjadi salah satu lokus utama Program Kotaku. Pengumpulan data lapangan dilakukan antara bulan September hingga Desember 2022. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam Program Kotaku. Total informan berjumlah 10 orang. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi silang informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan (pemerintah, masyarakat, swasta)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam *Collaborative Governance* ada beberapa aspek yang harus di perhatikan untuk menunjang keberhasilan sebuah program yakni dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, sikap saling memahami, dan dampak bersama. Kolaborasi yang dilakukan ini mencakup beberapa pihak yang berasal dari pemerintah, masyarakat ataupun swasta. Kolaborasi ini dilakukan sebagai wadah untuk saling melengkapi kekurangan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh beberapa pihak yang terlibat didalam kolaborasi. Karena dalam menangani permukiman kumuh itu sangat kompleks jadi diharapkan adanya kerjasama atau kolaborasi ini hasilnya nanti bisa menentukan kira-kira pihak siapa saja yang harus terlibat dalam penanganan permukiman kumuh ini melalui Program Kotaku. Sehingga penulis berfokus pada collaborative governance dalam upaya penanganan pemukiman kumuh melalui program Kotaku (Kota tanpa kumuh) di kabupaten bulukumba dengan menggunakan teori ansell and gash serta pedoman Kotaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi melalui program Kotaku dengan pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman layak huniPembaruan institusi adalah perubahan visi sebagai perwujudan nilai organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan organisasi. Pentingnya Konsep Kolaborasi dalam pembangunan Kelurahan Semanggi juga menjadi kegiatan yang sangat penting, dimana kita harus melihat tujuan yang akan di capai, dimana persoalan yang di hadapi oleh semua pihak sudah sangat komplek dan kronis sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim

memahami persoalan yang di hadapi oleh pihak lain serta pergeseran posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Masyarakat yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana harus di pasok. Sehingga Penelitian ini akan berfokus pada proses kolaborasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak, peneliti menggunakan teori Ansall dan Gash (2007) untuk menjelaskan proses kolaborasi dalam program Kotaku di Kelurahan kalumeme sebagai berikut:

Face To Face Dialogue (Dialog Tatap Muka)

Face to face dialogue ini diartikan sebagai pertemuan yang membangun awal komunikasi dalam perencanaan program KOTAKU sebelum dalam tahap pelaksanaan. *Face to face dialogue* yang dilakukan oleh pihak yang berkolaborasi, dimana tahap ini memulai cara membangun komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Tahap ini dalam program Kotaku biasanya melalui dengan rapat koordinasi ataupun forum terbuka sebagai media untuk berkomunikasi dari seluruh pihak yang terlibat. Selain membangun komunikasi, tahap ini juga biasanya digunakan untuk mengambil tindakan negosiasi bersama-sama baik dari pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Hal tersebut didukung dari wawancara beberapa informan terkait rapat sosialisasi serta koordinasi yang dilakukan secara berkala. Dari observasi yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan ternyata Koordinator LKM tidak mengetahui secara pasti, karena dalam rapat koordinasi biasanya dilakukan oleh perwakilan dari kelurahan yang biasanya adalah Kepala Kelurahan untuk mengikuti, sedangkan Koordinator LKM sendiri, hanya sebatas mengetahui tetapi tidak terlibat langsung didalamnya karena sebagai penerima dan pelaksana program. Koordinasi dengan OPD juga jarang dilakukan disebabkan pendaan yang kurang itulah mengapa sering terjadi tumpah tindih dikarenakan saat melalukan sosialisasi ataupun koordinasi ada beberapa OPD yang tidak hadir sehingga saat rapat berikutnya pembahasan yang sebelumnya harus diulang kembali. Untuk itu pemerintah sebaiknya rutin mengadakan sosialisasi dengan semua perangkat yang terlibat agar tujuan dari program ini dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Trust Buliding dalam proses kolaborasi ini sangat penting, dimana dalam proses ini semua *stakeholder* harus saling menumbuhkan kepercayaan, karena setiap *stakeholder* mempunyai keahlian dibidang tertentu dan juga keterbatasan tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi adalah semua *stakeholder* yang terlibat harus memahami peran dan tugas masing-masing. Sejalan dengan hasil wawancara serta observasi maka dapat disimpulkan bahwa memang membangun kepercayaan antar *stakeholder* memang penting namun dalam realitanya membangun kepercayaan dalam program ini begitu sulit dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat mulai dari OPD, swasta hingga masyarakat. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa Dari hasil observasi Yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Dalam pelaksanaan program ini memang benar bahwa pihak masyarakat sekitar pun diikutsertakan dalam proses pembangunan program ini, dibuktikan dengan mempercayakan pihak kelurahan menunjuk BKM dan LSM secara langsung untuk mengatur pendanaan yang masuk serta mencari buruh pekerja yang merupakan warga sekitar sehingga secara tidak langsung warga pun menjadi bagian dari pelaksana program ini. Penganggaran dilakukan secara berkala, Setelah itu dana dimasukan ke rekening BKM untuk dibagikan kepada panitia atau KSM sebagai perwakilan daari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Kelurahan kalumeme.

Commitmen to Process (Komitmen Terhadap Proses)

Komitmen harus dipegang secara penuh melalui sebuah perjanjian yang sah dan disepakati oleh semua pihak atau disetujui oleh forum sebagai bukti tanda kerjasama. Komitmen dari masing-masing *stakeholder* sudah menjadi point penting dalam proses

kolaborasi, karena komitmen ini juga menentukan bagaimana proses kolaborasi bisa terwujud sesuai dengan apa yang diinginkan atau hanya memenitngkan kepenitngan sendiri saja. Berkomitmen terhadapa sebuah Kolaborasi bukanlah hal yang mudah, Perlunya rasa tanggung jawab yang besar terhadap sebuah program agar pihak yang terlibat mampu berkomitmen terhadap tugas dan fungsinya. Perbedaan kapasitas yang dimiliki para aktor memunculkan rasa ketergantungan yang dapat menumbuhkan dan memperkuat komitmen (Fairuza, 2017). Itulah mengapa berkomitmen pada suatu proses sangat diperlukan agar setiap stakeholder yang terlibat merasa memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan untuk dijalankan sebaik-baiknya agar tujuan Bersama dapat tercapai. Dari hasil observasi peneliti menemukan bahwa komitmen setiap stakeholder pada program ini belum sepenuhnya berjalan dengan cukup baik dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat sehingga menimbulkan banyak presepsi yang berbeda. Apalagi dalam menumbuhkan komitmen ini banyak penanggung jawab yang belum tentu paham sepenuhnya terkait tugas yang diberikan.

Sikap Saling Memahami

Semua pihak yang terlibat atau berada dalam ruang lingkup proses *Collaborative Governance* harus saling memahami antara satu lembaga atau organisasi dengan lembaga yang lain, saling memenuhi hal yang dibutuhkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya karena hasil yang ingin dicapai telah sepakati secara Bersama. Pemahaman tujuan, visi serta misi harus selaras agar tidak terjadi *misscomunication* antar para pelaku program tersebut. Pemahaman bersama merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai common misision (misi umum), common purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas umum), dan shared vision (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar aktor (Fairuza, 2017).

Dari hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya terkadang terjadi tumpeng tindih pekerjaan antara dua dinas yang belum mengetahui secara jelas dan pasti, dilapangan ditemukan bahwa ketumpang tindihan ini terjadi. Selain itu, hambatan yang lainnya adalah banyak item yang diperlukan dalam kegiatan tidak terdefinisi sejak awal sehingga menjadi sulit dalam pelaksanaan program maka dari itu terkadang rapat koordinasi yang dilakukan mendadak.

Intermediated Outcomes (Dampak Sementara)

Kolaborasi yang dilakukan selain berfokus pada proses tetapi juga melihat bagaimana hasil yang sudah dicapai sejauh ini selama proses kolaborasi itu dilakukan oleh semua *stakeholder* dalam pelaksanaanya dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan kalumeme. Dimulai dari kemenangan kecil atau *small wins* diartikan yang telah dicapai oleh pihak-pihak yang berkolaborasi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan kalumeme. Keberhasilan yang dicapai saat pelaksanaan program sudah ada, tetapi tidak dipungkiri bahwa keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam menyelesaikan program dan juga mengenai *win solution* antar stakeholder juga berlaku. Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hasil atau dampak sementara dari pelaksanaan program ini bias dikatakan berhasil untuk daerah kelurahan kalumeme sendiri. Dimulai dari peranan setiap actor baik dari pemerintah, actor swasta, hingga masyarakat yang sangat berdampak bagi program ini. Walaupun keberhasilan dari program ini belum 100% berdampak bagi semua Kawasan kumuh, namun kita sudah merasakan dampak dibeberapa Kawasan salah satunya adalah di kelurahan kalumeme. Dampak sementara terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu ada kata “sementara” di dalamnya. Dampak sementara menghasilkan feedbacks. Umpam balik yang diharapkan adalah umpan balik yang positif, yang disebut “small-wins” (kemenangan kecil) atau Roberts dan Bradley (1991)

menyebutnya sebagai temporal property. Kemenangan kecil ini akan meningkatkan harapan masingmasing aktor dalam kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan komitmen (Fairuza, 2017).

Sejalan dengan itu peneliti menemukan bahwa Dari hasil observasi peneliti disimpulkan bahwa hasil Mengenai pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Kalumeme sudah berhasil salah satunya adalah RW 10 yang sudah selesai penataan melalui program Kotaku. Ada beberapa perbaikan atau rehabilitasi diantaranya pembangunan jembatan penghubung, saluran drainase, taman kota, sumur bor, dan perbaikan jalan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* dalam Program Kotaku di Bulukumba belum mencapai titik ideal seperti yang digambarkan oleh Ansell dan Gash (2008). Kegagalan dialog yang konsisten menjadi hambatan utama, karena ini adalah fondasi untuk membangun kepercayaan dan pemahaman bersama. Tanpa dialog yang efektif, setiap aktor cenderung bekerja dalam silo, yang menjelaskan temuan adanya tumpang tindih pekerjaan dan koordinasi yang lemah. Tantangan dalam membangun kepercayaan sejalan dengan studi oleh Vangen dan Huxham (2003) yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah hasil dari proses panjang yang rapuh. Dalam kasus ini, delegasi wewenang kepada BKM merupakan langkah positif, namun tanpa mekanisme kontrol dan transparansi yang kuat, hal itu justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan baru di tingkat komunitas.

Konflik pembebasan lahan merupakan manifestasi dari kurangnya *shared understanding*. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan negosiasi awal belum berhasil menyatukan persepsi antara tujuan makro program (penataan kawasan) dan kepentingan mikro warga (kepemilikan lahan). Hal ini menggarisbawahi pentingnya mediasi konflik sebagai komponen integral dalam *collaborative governance*, sebuah aspek yang ditekankan oleh Susskind dan Cruikshank (1987). Dibandingkan dengan keberhasilan kolaborasi di tempat lain, kasus di Bulukumba menunjukkan bahwa keberadaan forum kolaborasi formal (Pokja, rapat) tidak menjamin keberhasilan proses jika tidak didukung oleh kualitas interaksi yang substantif.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses collaborative governance dalam Program Kotaku di Kelurahan Kalumeme, jika dianalisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash, berjalan dengan cukup baik pada aspek pembentukan awal namun menghadapi hambatan serius pada dimensi proses inti. Dialog tatap muka tidak konsisten, kepercayaan terhambat oleh isu transparansi, dan komitmen tergerus oleh konflik kepentingan terkait lahan. Meskipun program berhasil memberikan dampak sementara berupa perbaikan infrastruktur fisik, tantangan dalam proses kolaborasi itu sendiri berisiko mengancam keberlanjutan program dan menghambat pencapaian tujuan "Kota Tanpa Kumuh" secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), xx–xx.
- Brown, W. (2002). Suffering the paradoxes of rights. In W. Brown & J. Halley (Eds.), *Left legalism/left critique* (pp. 420–434). Duke University Press.
- Carrasco, S., Ochiai, C., & Okazaki, K. (2016). Disaster-induced resettlement: Multi-stakeholder interactions and decision making following Tropical Storm Washi in Cagayan de Oro, Philippines. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 218, 35–49.
- Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan tantangan penanganan kawasan kumuh di Kota Ambon. *Fikratuna: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 8(2), xx–xx.
- Fitriana, B. M., & Tinov, M. Y. T. (2018). Kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh

- melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Sukarmai Kecamatan Pekanbaru Kota tahun 2016–2017 (Skripsi, Universitas Riau).
- Gray, B. (1989). Collaborating: Finding common ground for multiparty problems. Jossey-Bass.
- Munawaroh, A., Syamsulhuda, S. B. M., & Widjanarko, B. (2016). Beberapa faktor yang berhubungan dengan praktik imunisasi pentavalen booster di wilayah kerja Puskesmas Mangunsari Salatiga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* (Undip), 4(3), 949–959.
- Olthuis, K., Benni, J., Eichwede, K., & Zevenbergen, C. (2015). Slum upgrading: Assessing the importance of location and a plea for a spatial approach. *Habitat International*, 50, 270–288.
- Rosyida, G. P. D. (2017). Kolaborasi dalam perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Kalumeme Kota Surakarta (Skripsi, Universitas ...).
- Satori, D., & Komariah, A. K. (2011). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Setiadi, A. (2014). Tipologi dan pola penanganan permukiman kumuh di Kota Bontang. *Tataloka*, 16(4), 220–233.
- Short, C., & Winter, M. (1999). The problem of common land: Towards stakeholder governance. *Journal of Environmental Planning and Management*, 42(5), 613–630.
- Sobandi, R., & Sudarmadji, N. (2015). Knowledge sharing and stakeholder collaboration practice in Solo city planning and development: Notes on urban community nurturing processes. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 184, 161–170.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D (ed. revisi). Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2014). Penerapan discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI B mata pelajaran matematika pokok bahasan keliling dan luas lingkaran di SDN Tanggul Wetan 02 Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. *Pancaran Pendidikan*, 3(2), 165–174.
- Susskind, L., & Cruikshank, J. (1987). Breaking the impasse. Basic Books.
- Tett, L., Crowther, J., & O'Hara, P. (2003). Collaborative partnerships in community education. *Journal of Education Policy*, 18(1), 37–51.
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Nurturing collaborative relations: Building trust. *Public Management Review*, 5(2), 193–210..